

MENCERMATI GEREJA KATOLIK DI KEPULAUAN SUNDA KECIL DALAM BINGKAI PROPAGANDA FIDE – SUATU TINJAUAN SOSIO-HISTORIS

Donatus Sermada

Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana
Email: donatusse@hotmail.com

Recieved: 28 Oktober 2022 Revised: 11 November 2022 Published: 12 Desember 2022

Abstract

Lesser Sunda Islands cover up Bali-Province, West-Nusa Tenggara Province (NTB) and East-Nusa Tenggara Province (NTT) in the structure of Indonesian government nowadays. The author tries to observe the situation of the catholic church in this region before the presence of Propaganda Fide in 1622 up to 1949, when the Dutch government recognized Indonesian independence legally. Some historical periods of foreign occupation have framed the situation of the catholic church which catholicity has been adhered by the local inhabitants during these periods. The historical periods are the period of Portuguese power and of VOC-power followed by Dutch East Indies Government up to 1949 being interrupted by Japan occupation. During these historical periods the catholic people lived and worked under the pastoral care of some religious orders.

Keywords: Catholic Church; Propaganda Fide; Lesser Sunda Islands; Portuguese: Dutch

Abstrak

Kepulauan Sunda Kecil dalam struktur pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dewasa ini meliputi Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Penulis mencermati situasi gereja Katolik di kawasan ini sebelum lahirnya Propaganda Fide 1622 hingga tahun 1949, ketika Belanda mengakui secara resmi kemerdekaan Indonesia. Beberapa fase historis kekuasaan asing membingkai situasi gereja katolik yang kekatolikannya dalam kurun waktu itu sudah dianuti juga oleh penduduk setempat. Fase-fase historis itu adalah fase kekuasaan Portugis; fase kekuasaan VOC Belanda yang dilanjutkan dengan kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda

hingga tahun 1949 dengan disela oleh masa pendudukan Jepang. Di dalam fase-fase historis ini, orang-orang katolik hidup dan berkarya di bawah asuhan beberapa serikat religius.

Kata Kunci: Gereja Katolik; Propaganda Fide; Sunda Kecil; Portugis; Belanda

1. Pendahuluan

Lahirnya Propaganda Fide pada tahun 1622 dilatarbelakangi oleh pergulatan sosial-politis-religius di Eropa. Misi gereja katolik di Kepulauan Sunda Kecil di Indonesia tentu terkena getah oleh pergulatan itu di sepanjang sejarah kehidupan umat katolik. Dalam kurun waktu antara masa okupasi bangsa Portugis sebelum kedatangan Belanda dan masa penjajahan Belanda di bawah VOC dan pemerintahan Hindia Belanda hingga tahun 1949 terasa kuat juga adanya konflik-konflik sosial-politis-religius di Indonesia. Jatuh-bangunnya kehidupan umat katolik di wilayah ini ditentukan oleh peran dan pengaruh serikat-serikat religius yang berkarya di sana pada waktu itu. Ordo Dominikan mengawali misi gereja katolik di wilayah itu sebelum terbentuknya Propaganda Fide, lalu ada masa kekosongan kehadiran para klerus oleh karena merajanya kekuasaan VOC Belanda. Sesudah keruntuhan VOC Belanda dan pada masa pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia, imam praja dan ordo Yesuit diutus untuk berkarya di wilayah itu dan pada tahun 1913 dan 1914 Serikat Sabda Allah (SVD) mengambil alih misi gereja katolik dari tangan Ordo Yesuit.

2. Pembahasan

2.1 Lahirnya Propaganda Fide dalam pergulatan sosial-politis-religius di Eropa

Lahirnya Propaganda Fide pada tahun 1622 dalam konteks sejarah filsafat berada di antara paradigma berpikir abad pertengahan dan paradigma berpikir abad modern di dunia Eropa. Para cendekiawan Barat alias para pemikirnya yang adalah cendekiawan Gereja Katolik perlahan-lahan melepaskan diri dari cara berpikir abstrak dan menaruh perhatian pada hal-hal yang konkret. Cara berpikir abstrak yang terfokus pada soal-soal metafisis perlahan-lahan beralih kepada cara berpikir konkret yang terpusat pada soal-soal dunia dan manusia, pada situasi konkret gereja katolik di bidang politik dan agama, di bidang ilmu pengetahuan, di bidang kebudayaan dan sastra dan sebagainya (Hadiwijono, 1980:118).¹ Meskipun sulit ditentukan kapan tepatnya berakhir abad pertengahan dan kapan tepatnya awal mula abad modern, secara umum diperkirakan bahwa abad 14 hingga abad 16 merupakan abad peralihan yang ditandai dengan lahirnya Gerakan Renaissance (Hadiwijono, 1980:11)² yang dipelopori kaum humanis Italia pada

¹ Sari Sejarah Filsafat Barat 1

² Sari Sejarah Filsafat Barat 2

abad 15 (Audi, 1995:340-341 bdk. Waardenburg, 1986:41-47). Kaum humanis mempromosikan manusia dan segala kemampuan manusia sebagai titik pusat untuk memecahkan masalah-masalah konkret di segala bidang kehidupan manusia.

Di dalam tubuh agama, tepatnya di dalam tubuh gereja katolik, gerakan kaum humanis memuncak pada lahirnya gerakan reformasi yang dipimpin oleh Martin Luther pada tahun 1517, seorang biarawan katolik dari ordo Agustinian (OSA) di Jerman. Ia mengeritik keras kekuasaan penuh Paus dalam menentukan ajaran iman dan menolak praktek-praktek iman seperti indulensi yang menurutnya telah beralih kepada kegiatan pengumpulan dana untuk pembangunan basilika Santo Petrus di Roma. Gerakan reformasi Luther yang mengawali lahirnya Protestantisme merebak hampir di seluruh tanah Jerman dan kemudian meluas pengaruhnya ke Perancis, Spanyol, Portugis dan Italia. Propaganda Fide yang lahir pada perempatan pertama abad 17 itu berada sejalan dengan Gerakan Kontra-Reformasi yang datang dari kubu gereja katolik yang taat dan setia kepada otoritas paus di Roma. Konsili Trente (1545-1563) menyingkapkan kelemahan-kelemahan Gerakan reformasi Luther (Guilday, 1921:478), dan kehadiran ordo-ordo religius seperti Ordo Fransiskan sejak abad 12, Ordo Dominikan (OP) sejak abad 13, Ordo Yesuit sejak abad 16, dan Kongregasi Misi Vinsensian sejak abad 17, justeru menjadi tanda ketaatan dan kesetiaan kelompok sosial-religius Katolik terhadap ajaran-ajaran resmi gereja dan setia tunduk pada otoritas paus di Roma.

Di bidang sosial-politik, gereja katolik sendiri yang terbagi dalam kelompok-kelompok sosial kaum bangsawan, kaum klerus dan biarawan-biarawati, kelompok cendekiawan dan ilmuwan, kaiser dan para raja, rakyat biasa, dihadapkan dengan isu-isu politis yang aktual di masa itu. Isu politis yang mendesak para penguasa baik penguasa duniawi maupun penguasa rohaniah adalah usaha untuk memisahkan kekuasaan rohaniah dari kekuasaan duniawi. Kekuasaan rohaniah dijalankan oleh Paus dan para klerus, dan kekuasaan duniawi dijalankan oleh para penguasa sekular seperti para bangsawan, kaiser dan raja-raja (Kilcullen, 2012:768-803). Reformasi Martin Luther di abad ke 16 bertumbuh dari benih-benih reformasi di dalam tubuh gereja katolik sendiri pada abad 11, ketika ada usaha penguasa rohani, yaitu Paus dan para klerus, untuk membebaskan diri dari genggaman kekuasaan sekular para bangsawan yang telah menguasai bidang militer, politik dan agama. Dalam perjalanan waktu, usaha penguasa rohaniah ini membuatkan krisis besar menyangkut hubungan antara agama (gereja) dan negara, antara pemerintahan rohaniah dan pemerintahan sekular, karena dengan legitimasi religius, paus memiliki kekuasaan penuh atas pemerintahan sekular. Paus mempunyai wewenang untuk mengangkat dan menurunkan kaiser dan raja dari kekuasaan mereka (Kilcullen, 2012:769-777). Debat dan diskusi tentang batas-batas kekuasaan paus dan hubungannya dengan kekuasaan duniawi bermunculan di mana-mana di kalangan cendekiawan katolik. Thomas Aquinas berbeda pendapat dengan William Okham tentang hubungan

antara kekuasaan rohaniah dan kekuasaan sekular. Menurut Thomas Aquinas, kekuasaan rohaniah di bawah Paus dan kekuasaan sekular di bawah kaiser dan raja sama-sama berasal dari Tuhan. Karena itu kekuasaan rohaniah lebih tinggi dari kekuasaan sekular, dan kekuasaan Paus bisa meluas ke dalam urusan-urusan pemerintahan sekular; tidak ada pemisahan tajam antara kekuasaan Paus dan kekuasaan sekular. Sementara itu, William Okham berpendapat bahwa Paus sebagai pemimpin rohaniah tidak memiliki kekuasaan penuh. Urusan pemerintahan sekular diletakkan saja pada urusan kaum awam. Paus harus menghormati hak dan kebebasan yang diberikan kepada pemerintahan sekular menurut hukum yang diatur dalam hukum kodrat, dalam hukum adat atau dalam hukum yang mengatur kehidupan bermasyarakat (Kilcullen, 2012:787-791).

Debat dan diskusi tentang itu perlahan-lahan berganti dengan kebijakan dan tindakan politis yang dijalankan baik oleh para penentang kekuasaan mutlak Paus maupun oleh para pendukung kekuasaan Paus. Reformasi Luther yang berdampak pada pembentukan beberapa aliran Protestantisme berhasil memikat banyak pengikutnya untuk menentang supremasi kekuasaan Paus baik dalam urusan agama maupun dalam urusan duniawi. Sementara itu, para pendukung kekuasaan paus berusaha untuk membenahi gereja katolik dari dalam tubuh gereja katolik sendiri dengan jalan mempromosikan katolisme ke mana-mana, mempertahankan kesatuan erat dengan kekuasaan paus di Roma, membangun Lembaga Pendidikan imam untuk kepentingan penyebaran iman katolik di wilayah-wilayah Non-Katolik dan lain-lain (Guilday, 1921:478-480). Sebuah komisi yang agak formal dari beberapa kardinal yang dibentuk oleh paus Gregorius ke XIII (1572-1585) bertugas untuk pembenahan itu. Komisi ini bekerja dalam semangat Contra-reformasi yang diformulasikan dalam dokumen Konsili Trente, dan buah dari Gerakan Contra-reformasi secara formal-yuridis tercermin dalam bula Paus Gregorius ke XV *"Inscrutabili"* yang diumumkan pada tanggal 22 Juni 1622, dan hal ini menandai lahirnya Propaganda Fide.³

Di bidang ilmu pengetahuan, abad peralihan dari abad pertengahan ke zaman modern ditandai oleh perbenturan antara otoritas gereja yang mengurusi ajaran iman dan kebebasan ilmuwan yang membuat penelitian di bidang ilmu pengetahuan alam. Pembentukan Konggergasi Propaganda Fide tidak punya hubungan langsung dengan perbenturan itu, tetapi iklim akademis yang diwarnai oleh supremasi otoritas gereja katolik terhadap ilmuwan yang menghasilkan temuan-temuan baru di bidang ilmu pengetahuan alam tentu menyerap masuk ke Lembaga-lembaga pendidikan imam misionaris di seminari-seminari yang berada langsung di bawah konggergasi Propaganda Fide. Kasus Galileo Galilei (1564-1642) yang diajukan ke pengadilan gereja di Italia pada tanggal 22 Juni 1633 oleh karena publikasinya tentang tata surya dengan matahari sebagai pusat alam semesta – dukungan terhadap teori Nikolaus Kopernikus (1473-1543) – menjadi

³ www.Congregation for the Evangelization of Peoples, Google, diakses 31 Oktober 2022.

kontroversi publik yang tentu berimbang juga pada penentuan arah dan strategi pembinaan iman dan pengetahuan yang harus diemban oleh konggergasi Propaganda Fide dalam pendidikan para calon imam misionaris.

2.2 Gereja Katolik di Kepulauan Sunda Kecil hingga Tahun 1622

Kepulauan Sunda Kecil mengacu pada gugusan pulau-pulau yang terletak di tiga provinsi dalam struktur pemerintahan Indonesia dewasa ini, yaitu Propinsi Bali, Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Umat katolik sebelum tahun 1622 sudah ada di wilayah gugusan pulau yang terletak di propinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu di Pulau Timor, Pulau Flores, Solor, Adonara, Lembata, Sabu, Rote, Pantar, Alor, Pulau Ende. Misi gereja Katolik di wilayah-wilayah yang didiami umat katolik dikenal dalam sejarah gereja katolik dengan nama “*Misi Solor*” (Jebarus, 2017:14) di gugusan Kepulauan Solor.

“*Untuk menjaga supaya Gereja Katolik tidak terlalu tergantung pada Spanyol dan Portugal maka 128 tahun kemudian, tahun 1622, didirikan Congregatio de Propaganda Fide oleh Paus Gregorius XV*”, kata penulis dalam buku Sejarah Gereja Katolik Indonesia.⁴ Kalimat ini menunjukkan bahwa dalam tahun-tahun sebelum pembentukan konggergasi Propaganda Fide, belum ada pemisahan antara kekuasaan rohaniah (Paus dan klerus) dan kekuasaan duniaawi (raja dan kaiser) untuk menjalankan misi gereja katolik di wilayah-wilayah non-Katolik. Misi Solor berada di bawah tanggung jawab kerajaan Portugis yang dipercayakan Paus untuk mengurus juga penyebaran iman katolik, selain urusan politik dan perdagangan pemerintahan Portugis. Keuskupan Malaka yang didirikan pada tahun 1558 atas dasar persetujuan antara Paus dan kerajaan Spanyol dan Portugis pada tahun 1493 membawahi umat katolik yang mendiami wilayah misi Solor, termasuk wilayah Timor Timur. Uskup pertama keuskupan Malaka, Mgr. Jorge da Santa Luzia, OP (1558-1579), ketika mendengar bahwa sudah ada orang katolik di kepulauan Solor, mengirim secara resmi tiga misionaris Dominikan ke kepulauan Solor. Mereka adalah P. Antonio da Cruz, OP; P. Simao da Chagas, OP dan Bruder Fransisco Alexio, OP. Mereka tiba di Solor pada tahun 1561, dan dengan demikian pada tahun itu terbentuklah secara resmi hirarki gereja katolik di kepulauan Solor dengan pusat keuskupannya di Malaka (Malaysia sekarang).

Ketika ketiga misionaris Dominikan itu tiba di Solor, sejarah mencatat bahwa sudah ada sejumlah umat katolik yang dipermandikan oleh Pater Antonio da Taveira di Timor dan di Flores pada tahun 1555 dan oleh pedagang Portugis, Joao Soarez, di kampung Lewonamang di sebelah timur Larantuka di daratan Flores bagian timur pada tahun 1559 (Jebarus, 2017:5-14). Orang-orang Katolik di

⁴ Bagian Dokumentasi-Penerangan Kantor Wali Gereja Indonesia, *Sejarah Gereja Katolik Indonesia 1 Umat Katolik Perintis 645-1500. Awal Mula Abad ke-14 - Abad ke-18*. Ende: Percetakan Arnoldus, 1974, p. 53

wilayah Flores ini adalah orang-orang pribumi Lamaholot yang dalam lingkungan sosial-politik-religius pada waktu itu belum berpengaruh. Tetapi pertanyaannya, mengapa orang pribumi dalam jumlah yang cukup besar pada waktu itu merasa tertarik dengan iman katolik sehingga menerima permandian. Pada hal, situasi sosial-religius-politis masyarakat Lamaholot sebelum kedatangan agama Katolik dan Islam tidak kondusif untuk masuknya dan menyebarluasnya agama Katolik.

Penemuan Patung Santa Perawan Maria yang dikenal dengan nama “*Tuan Ma*” mencerminkan sedikit situasi sosial-religius masyarakat Lamaholot. Patung itu ditemukan sekitar tahun 1510 di pesisir pantai Larantuka oleh seorang anak laki-laki yang bernama Resiona; kemungkinan besar patung itu terhanyut oleh karena karamnya kapal Portugis atau Spanyol di perairan Flores (Jebarus, 2017:6-7). Patung itu bersosok perempuan yang berduka, dan karena masyarakat setempat belum mengenal sosok perempuan itu dan hanya percaya bahwa patung itu tentu merupakan kiriman dari langit dalam sosok seorang dewi, maka patung itu dihormati dan diarak ke korke, tempat kebaktian masyarakat setempat. Beberapa puluh tahun kemudian seorang misionaris Dominikan tiba di Larantuka dan patung itu ditunjuk kepadanya. Dia sempat membaca tulisan yang masih tertera pada patung itu, yaitu “*Reinha Rosario Maria, Mater Dolorosa. Ora pro Nobis*” (Maria Ratu Rosario, Bunda Berduka-cita. Doakanlah kami). Misionaris itu memperkenalkan sosok patung itu sebagai patung **Bunda Maria yang berduka** kepada umat katolik di situ dan tentu menjadikan patung itu sebagai bahan katekese untuk pengajaran iman katolik. Lebih dari itu, misionaris itu menciptakan dan menghadirkan tradisi perarakan patung itu pada setiap Jumat Agung dalam pekan suci yang dikenal dengan nama “*Semana Santa*” di Larantuka.

Lalu, apa hubungan patung itu dengan situasi sosial-religius-politis masyarakat Lamaholot? Sejarah masa lampau masyarakat Lamaholot sebelum penemuan patung itu ditandai dengan perang demi perang antar suku untuk memperebut dan mempertahankan tanah serta membangun konsolidasi suku-suku dalam rangka pembentukan “*lewo tanah*” (kampung halaman). Perang besar yang masih menghangat di telinga masyarakat Lamaholot hingga saat ini dalam cerita lisan adalah perang Paji-Demon (Arndt, 2002:19-124)⁵ yang berdampak pada persekutuan Paji dengan Islam dan VOC Belanda melawan persekutuan Demon dengan Orang Katolik dan Portugis. Cerita lisan menuturkan juga kengerian dan kebrutalan perang-perang yang berkecambuk di sepanjang sejarah masa lampau masyarakat Lamaholot sebelum kedatangan kekristenan dan

⁵ Paji-Demon dalam penuturan lisan adalah dua laki-laki yang bersaudara kandung, dan asal usulnya masih gelap hingga sekarang. Ada berbagai macam cerita mitos tentang keduanya dan tentang perperangan antara keturunannya hingga kedatangan bangsa Portugis ke daerahnya. Keturunan keduanya saling bermusuhan, dan kearifan lokal menyebut perperangan antara keduanya untuk merebut air susu ibu mereka.

Islam (Sermada, 2018:149). Pertumpahan darah terjadi di mana-mana di wilayah ini, dan kepala mayat dari suku yang kalah perang diarak dengan sorak-sorai dibawa ke korke, sementara tubuh-tubuhnya dibuang atau dikuburkan begitu saja, dan ada banyak kengerian perang lain lagi.

Sosok historis bunda Maria yang berduka seperti tergambar pada patung Bunda Maria tentu tidak dikenal sebelum masuknya agama katolik, tetapi sosok perempuan mitis, Tonuwuyo, yang dibunuh dan dikorbankan untuk dijadikan makanan manusia, dikenal luas di daratan Flores bagian timur, malah dihormati dalam ritus-ritus pengolahan ladang. Kebudayaan patriarkat yang menempatkan supremasi laki-laki di ruang publik kehidupan masyarakat Lamaholot tidak memberikan ruang gerak penting untuk perempuan dalam kehidupan publik. Hanya ada satu kebiasaan yang dikenal umum dalam kehidupan perempuan di ruang publik adalah “*tradisi ratapan*” yang selalu dijalankan oleh perempuan-perempuan yang berduka, terutama para ibu yang kehilangan orang-orang tercintanya. Sosok perempuan yang berduka pada tradisi ratapan justeru secara intensif memperlihatkan wajah sebuah lapisan sosial masyarakat yang tak berdaya dan lemah, dan itu pada umumnya mengena pada kaum perempuan, anak-anak dan mereka yang kalah perang. Perang dan pembantaian secara tersirat membahasakan lapisan sosial yang tak berdaya, lemah dan kalah perang. Wajah perempuan yang berduka seperti pada patung Bunda Maria dan pada narasi perempuan mitis yang dibunuh untuk memberi hidup pada manusia merupakan sebuah bahasa kolektif tentang situasi penderitaan dan duka yang harus ditanggung masyarakat Lamaholot oleh karena berkecamuknya perang demi perang sepanjang sejarah hidup masyarakat Lamaholot. Penghormatan terhadap perempuan mitis oleh masyarakat lewat ritus-ritus pengolahan ladang menemukan resonansi religius dalam penghormatan terhadap sosok Bunda Maria yang berduka. Iman masyarakat pribumi yang non-Katolik menemukan affinitas batiniah yang mewujud dalam iman katolik terhadap sosok Bunda Maria yang berduka, dan pengalaman iman model ini sungguh secara intensif meresap dalam lubuk hati masyarakat pribumi, ketika ditanamkan dan dijalankan tradisi prosesi Jumat Agung oleh misionaris Dominikan dan awam pribumi Dominikan yang dikenal “*Confreria*” seperti masih dijalankan sampai sekarang di tiga tempat: kota Larantuka, Konga (antara Larantuka-Hokeng), dan Wureh (di Pulau Adonara).

Dengan penempatan resmi tiga misionaris Dominikan oleh Uskup Malaka, iman umat Katolik di misi Solor dirawat, dan dari tahun ke tahun pertumbuhan jumlah umat Katolik di wilayah itu menggembirakan. Pusat misi terletak di Pulau Solor, yaitu Lohayong, dan dari pusat ini karya misionaris meluas ke wilayah lain di luarnya di Lembata, Adonara, Solor dan Flores (Jebarus, 2017: 11-18). Di stasi-stasi di wilayah itu didirikan gereja dan kapela. Melihat perkembangan jumlah umat katolik di wilayah itu, uskup Malaka meminta pembesar Dominikan di Lisabon untuk mengirim tenaga misionaris Dominikan ke Solor, dan permintaan

itu dikabulkan, sehingga bulan April 1587 tiba lagi 5 misionaris Dominikan untuk memperkuat barisan misionaris Portugis demi penyebaran iman katolik dan menyusul lagi datangnya sejumlah misionaris Dominikan ke sana sesudah tahun itu, sehingga dibukalah stasi-stasi ke arah barat Pulau Flores seperti Maumere, Sika, Paga, Pulau Ende dan wilayah pantai Pulau Flores yang berhadapan dengan Pulau Ende (Bagian Dokumentasi, 1974:382-383).

Tetapi perkembangan yang menggembirakan dari jumlah umat Katolik tidak bertahan lama. Pusat misi di Lohayong, Solor, diserang oleh armada Islam dari Jawa. Serangan armada Islam ini mengindikasikan bahwa sudah ada kelompok sosial islam yang adalah orang Lamaholot sendiri pada abad 15 (Alkhatab, 2015:134-135) di kepulauan Solor. Armada Islam dapat dipatahkan oleh kekuatan militer Portugis yang singgah di Larantuka dalam perjalanan mereka dari Maluku (Jebarus, 2017:12) sehubungan dengan kepentingan perdagangan. Maklum, Pulau Solor dan Pulau Timor pada masa itu sudah dikenal dengan penghasil kayu cendana. Serangan dari luar terhadap pusat misi Solor di Lohayong mendorong bangsa Portugis untuk membangun sebuah benteng yang kuat. Benteng yang kuat itu didirikan pada tahun 1566, dan di dalam benteng itu dibangun gereja induk yang berpelindungan “*Nossa Senhora da Piedade*” (Bunda Kita yang Berbelaskasih) dengan patung Santa Maria “*Renha Rosari*” di dalam gereja itu. Juga di dalam benteng itu ada Gedung untuk Pendidikan Seminari Kecil. Penghormatan dan devosi kepada Maria melalui doa Rosario yang menjadi ciri khas spiritualitas Dominikan, diwariskan kepada “*Confreria*” sebagai persaudaraan awam Dominikan dan berakar kuat dalam iman umat Katolik di tempat ini.

Situasi sosial umat katolik bertambah suram dan menyedihkan, ketika terjadi pembunuhan dan pembantaian para misionaris Dominikan dan umat Katolik di sana sini di misi Solor antara tahun 1581-1600. Pembunuhan dan pembantaian ini dilakukan oleh orang Islam dalam ikatan kesatuan dengan Belanda dan pengikut Paji melawan saudaranya pengikut Demon dalam ikatan kesatuan Demon dengan orang Katolik dan Portugis, seperti berkecamuknya perang di wilayah ini pada tahun 1598 (Sermada, 2018:153-154). Permusuhan antara Paji dan Demon di dalam masyarakat Lamaholot memang diperparah oleh semangat permusuhan yang sudah mendera orang katolik di negara-negara maritim Eropa termasuk Portugis dan Spanyol ketika melawan kekuatan kesultanan Ustmaniyah (1294-1923) yang Islam di Turki. Orang teringat akan kejatuhan Konstantinopel (sekarang Istanbul) ke tangan Islam pada tahun 1453 dan pertempuran besar di Lepanto antara kekuatan katolik dan kekuatan Islam pada tanggal 7 Oktober 1571 dengan kemenangan kekuatan militer negara-negara maritim yang katolik berkat doa Rosario. Situasi permusuhan di kepulauan Solor ini bertambah parah ketika kekuatan Islam bersatu dengan militer VOC (sebuah persekutuan dagang Belanda yang didirikan pada tahun 1602 di Indonesia) untuk menyerang benteng Lohayong, setelah pemerintah Spanyol yang berkuasa atas Portugis menutup kota

perdagangan rempah-rempah di Eropa pada tahun 1595, yaitu Lisabon (Portugis), untuk para pedagang rempah-rempah Belanda yang pulang-pergi ke Indonesia (Reksosusilo, 2007:31-37).

Maka terjadilah penyerangan besar-besaran terhadap benteng Lohayong, Solor, pada tanggal 17 Januari 1613 oleh militer VOC yang dibantu oleh armada Islam dari Buton Bugis (Sulawesi Tenggara). Tembakan Meriam ke dalam Benteng menggema sekitar 800 kali dan penyerbuan ke dalam benteng pun terjadi dengan akibat jatuhnya korban di pihak Portugis. Benteng Lohayong akhirnya jatuh ke tangan VOC dan diberi nama baru oleh VOC, yaitu Fort Henricus. Orang-Orang Katolik yang berhasil meluputkan diri dari malapetaka ini kebanyakan mengungsi ke Larantuka, sementara Pastor Agustino da Magdalena OP yang adalah pastor benteng Lohayong kemudian dibunuh oleh orang Islam di Lamakera; badannya dicincang dan dibuang di bawah perahu besar.

Pusat misi katolik di Lohayong beralih ke Larantuka. Orang-orang Katolik yang mengungsi ke sana bergabung dengan orang-orang katolik yang ada di Larantuka. Pendidikan seminari dipindahkan juga dari Lohayong ke Larantuka. Dengan adanya stasi-stasi baru yang dibuka ke arah barat Larantuka hingga ke wilayah Sika, kekuatan umat katolik dijamin. Iman katolik bertahan kuat, meskipun ada usaha dari Belanda untuk memprotestankan umat katolik di Larantuka. Hal ini terjadi demikian, karena pastor Larantuka, P. Fransisco Joao das Chagas, OP, berhasil membaharui iman umat dari anasir-anasir berhala dan memulai kebiasaan prosesi tobat setiap jumat pada masa puasa, merayakan pekan suci secara meriah, termasuk prosesi Jumat Agung. Kemungkinan besar, awal mula tradisi semana santa di Larantuka terjadi berkat usaha P. Fransisco Joao das Chagas, OP, pada tahun 1617 (Bagian Dokumentasi, 1974:377-383 bdk. Jebarus, 2017:18-19).

Larantuka akhirnya tidak hanya menjadi pusat misi gereja katolik setelah kejatuhan benteng Lohayong, tetapi juga menjadi pusat perdagangan kayu cendana dari Timor serta tempat singgahan yang aman para pedagang Portugis (Muskens, p. 392). Pada tanggal 16 Mei 1621 menjelang tahun kelahiran Propaganda Fide, kota Larantuka diserang oleh armada VOC Belanda dan Islam yang bermaksud untuk membinasakan semua orang katolik di sana. Penghuni kota Larantuka harus mengungsi ke hutan, termasuk Pastor Larantuka, P. Luis de Andrade, OP. Tetapi dari hutan, militer Portugis dalam kesatuan dengan para penghuni katolik menyerang balik dan berhasil mengusir pasukan Belanda dan Islam. Banyak orang Belanda dan Islam dibunuh, dan Larantuka bebas dari pendudukan Belanda dan Islam.

2.3 Gereja Katolik Di Kepulauan Sunda Kecil Dalam Periode 1622-1913

2.3.1 Gereja Katolik di Kepulauan Sunda Kecil dalam Periode 1622 – 1860

Ketika Benteng Lohayong di Solor jatuh ke tangan VOC, Pater Miguel Rangel OP sedang menjabat sebagai pastor di Larantuka dari tahun 1611-1614, dan sesudah itu dia diangkat menjadi Visitator dan Vikaris Jendral Dominikan untuk wilayah timur dengan berpusat di Goa, India. Dengan kedudukannya seperti ini, dia dari Goa memperhatikan misi Solor secara khusus. Dia mengutus misionaris-misionaris Dominikan ke kepulauan Solor lagi. Salah satu tokoh penting misionaris Dominikan yang diutus Pater Miguel Rangel OP ke Larantuka dan kemudian ke Timor adalah P. Antonio de S. Jacinto OP, mantan novis Pater Miguel di Goa. Pater Antonio dikenal sebagai seorang rohaniwan yang saleh, sangat cakap, seorang diplomat yang baik, pemimpin yang sangat giat untuk memperjuangkan kepentingan agama dan kepentingan pemerintahan Portugis (Bagian Dokumentasi, 1974:392).

Konggerasi Propaganda Fide yang bertujuan untuk melepaskan sedikit ketergantungan para klerus dari kekuasaan dunia selain untuk menyebarkan iman katolik ke wilayah non-katolik belum berdampak kuat untuk misi solor pada masa itu. Setelah pembentukan konggerasi Propaganda Fide, pembesar Dominikan di Goa mengunjungi Roma untuk meminta Paus agar menghimbau orang-orang Kristen di seluruh dunia memberi bantuan keuangan untuk misi Solor (Bagian Dokumentasi, 1974:385) selain bantuan keuangan yang berasal dari kerajaan Portugis. Ini berarti bahwa kesejahteraan hidup para pastor Dominikan dan kebutuhan pembangunan di tanah misi tidak mungkin dipenuhi, bila pastor Dominikan setempat tidak bekerja sama dengan pemerintahan Portugis setempat, malah pastor terlibat aktif dalam urusan politik, militer, ekonomi dan perdagangan. Hal ini bisa dipahami, karena musuh terbesar di bidang perdagangan dan di bidang agama adalah Kompeni Belanda (VOC) dan Islam. Setelah berdirinya VOC pada tahun 1602 dan setelah kejatuhan Malaka ke tangan Belanda pada tanggal 14 Januari 1641, perusahaan dagang swasta Belanda ini berusaha memonopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia, dan usaha ini harus dijalankan dengan kekuatan militer dan dengan politik kekuasaan. Terhadap orang-orang Islam, kompeni Belanda berusaha menjalankan politik *“divide et impera”*, yaitu memecah belahkan kekuatan-kekuatan kerajaan-kerajaan Islam di bumi Indonesia dan bersekongkol dengan kekuatan Islam yang pro Belanda untuk mengalahkan kekuatan Islam yang kontra Belanda. Terhadap orang katolik dan Portugis, kompeni Belanda menunggangi isu agama untuk kepentingan dagangnya dengan cara bersekongkol dengan kekuatan militer Islam untuk melawan Katolik dan Portugis. Bisa dimengerti juga bahwa di negri Belanda sendiri sudah terjadi perseteruan antara para penganut Protestantisme Calvinist dan penganut katolisisme, dan semangat perseteruan ini tetap bercokol

dalam diri para kompeni Belanda di Indonesia ketika berhadapan dengan orang katolik.

Kenyataan permusuhan itu terbukti dalam penyerangan terhadap benteng Portugis di Lohayong, Solor, dan kota Larantuka di Flores Timur beberapa kali oleh tentara VOC dan Islam. Pada tanggal 20 Januari 1641 armada Islam dari Makasar dengan kekuatan 150 perahu yang menampung 6000 orang awak menyerang kota Larantuka, setelah P. Antonio de S. Jacinto OP dan kapitan Mor Fransisco Fernandez menolak berunding dengan raja Telo, raja Bulukumba di bawah kesultanan Makasar dan menolak mengakui kekuasaan raja Telo atas Larantuka. Akibatnya, kota Larantuka diduduki Islam dan banyak patung di dalam gereja diporakporandakan. Penghuni Larantuka yang katolik lari mengungsi ke hutan. Begitu juga pasukan kecil orang katolik bersama P. Antonio de S. Jacinto OP lari bersembunyi di hutan, dan dari sana Pater Antonio memberanikan hati pasukan kecil orang katolik itu dengan kekuatan rohani, yaitu berdoa rosario untuk meminta bantuan Bunda Maria, sambil mengarahkan perhatian dan ingatan akan peristiwa kemenangan katolik dalam pertempuran di Lepanto 7 Oktober 1571 berkat doa rosario. Mereka melakukan petuah Pater Antonio, lalu dengan berani pasukan kecil itu menerobos masuk ke dalam kota Larantuka serta berhasil mengusir pasukan Islam dengan kekerasan sambil membunuh lebih dari 300 prajurit Islam.

Dengan kemenangan kekuatan pasukan katolik, raja Larantuka, Ola Adobala, yang merupakan raja kesepuluh dalam silsilah raja-raja Larantuka, meminta dibaptis, dan dia dibaptis oleh Pater Antonio de S. Jacinto OP dengan nama *“Fransisco Ola Adobala Diaz Viera Godinho”*. Dengan pembaptisan ini, seluruh kerabat raja dipermandikan menjadi katolik, sementara wilayah kerajaannya yang meliputi semua wilayah Demon (Demon lewo pulo) menjadi kubu katolik, meskipun banyak orang Lamaholot di pedalaman Flores belum menerima permandian. Pengalaman iman katolik raja Adobala mendorong dia untuk menyerahkan tongkat kerajaannya kepada Renha Rosario dan menjadikan Maria sebagai *“Ratu Larantuka”* pada tahun 1665, dan raja sendiri menyebut dirinya *“Servus Mariae”* (Abdi Maria). Kota Larantuka lalu disebut sebagai *“Kota Renya”*.

Pusat misi gereja katolik di Larantuka berkembang ke arah Pulau Timor. Sejak permandian yang dilakukan oleh Pater Antonio da Taveira OP di Timor pada tahun 1555, orang katolik dijumpai di Pulau Rote dan di beberapa tempat di daratan Timor, tetapi oleh karena ketiadaan pastor untuk beberapa waktu yang lama, tidaklah diketahui jelas perkembangan jumlah umat katolik selanjutnya. Permintaan orang katolik Rote akan kehadiran misionaris Dominikan dari Solor dikabulkan oleh Pater Miguel Rangel OP selaku Vikaris Jenderal Dominikan, dan sekitar tahun 1633 Pater Christofao Rangel OP dikirim ke Timor. Pater Christofao mendarat di Pulau Timor di wilayah kerajaan Silabau dan berhasil mempermandikan raja Silabau dengan akibat bahwa banyak rakyat kerajaannya

mengikuti raja Silabau untuk dipermandikan. Misionaris Dominikan yang berhasil mempermudik beberapa raja dan ratu di Timor dengan akibat bahwa banyak rakyat Timor di bawah kekuasaan raja-raja itu masuk katolik adalah Pater Antonio de S. Jacinto OP. Semula dia diutus oleh Pater Miguel Rangel OP ke Pulau Rote, tetapi ketika tiba di Pulau Rote, Pater Antonio merasa sulit untuk bekerja sendirian di tempat yang terpencil itu. Dia lalu menyeberang ke daratan Pulau Timor dan mendarat di Batu Putih di wilayah kerajaan Amavi. Dia dibawa oleh penduduk di situ untuk menghadap raja Amavi dan ditantang oleh raja dengan pertanyaan apakah dia datang dengan maksud untuk mengambil kayu cendana dari Timor, tetapi Pater Antonio menegaskan bahwa dia datang untuk membawa keselamatan rohaniah kepada penduduk di situ. Dia berhasil mempermudik raja Amavi dan penduduk di situ. Dari wilayah itu, Pater Antonio bergerak menuju wilayah kerajaan Amarasi dan kerajaan Mena. Dia berhasil juga mempermudik orang menjadi katolik di Amarasi.

Ketika misionaris Dominikan berkarya di Pulau Timor, di sana sudah ada juga orang Islam yang menetap di beberapa tempat. Sejarah mencatat bahwa pasukan raja Telo yang telah dipukul mundur dari Larantuka mengungsi ke Pulau Timor dan menetap beberapa waktu lamanya di wilayah kerajaan Waihale di Belu selatan (kabupaten Malaka). Raja Waihale yang berpengaruh besar di kawasan Pulau Timor telah bersimpati kepada agama Islam dan ada tanda-tanda bahwa dia ingin memeluk agama Islam, ketika dia mengenakan kopiah islam di kepalanya. Kemungkinan besar sudah ada rakyatnya yang telah memeluk agama Islam. Sesudah kematian raja Telo, Pater Antonio de S. Jasinto bersama dua orang Pater Dominikan (P. Christofao de Santiago dan P. Pedro Manso) berlayar dari Larantuka ke Pulau Timor dengan kapal perang dan kapal dagang. Mereka mengikutsertakan 70 prajurit. Mereka tiba di Pelabuhan Mena lalu berangkat ke Lifau (Wilayah Oekusi) dan seterusnya menuju pusat kerajaan Waehale. Di Mena dan di Lifau, dua raja yang sudah menjanda dari dua kerajaan itu berhasil dipermudik, dan dengan demikian kerabat raja bersama rakyat ikut juga dipermudik menjadi katolik. Karena raja Waihale mengancam raja-raja di sekitarnya bila raja-raja itu tidak masuk Islam, maka Pater Jacinto bersama pasukan militer yang dibawa dari Larantuka, bersama pasukan orang pribumi dari Mena dan Lifau dan bersama Kapitan Mor Ambrosio Diaz dengan 150 penembak jitu (Larantuqueiros) menyerbu masuk ke pusat kerajaan Waihale. Mereka berhasil menaklukkan raja Waihale dan menempatkan kerajaannya ke bawah kekuasaan Portugis, sementara raja dan sebagian besar bawahan raja dipermudik menjadi katolik.

Perdagangan kayu cendana memang pada saat itu sungguh menggiurkan orang Belanda dan Portugis. Kupang, tepatnya teluk Babau, telah diincar oleh Belanda untuk diduduki. Pater Jacinto mengetahui politik Belanda, dan karena itu, Pater Jacinto ingin menutup Kupang untuk singgahan kapal-kapal Belanda dan kapal-kapal Islam. Dia lalu menjalin relasi dengan raja Kupang (Duarte) dan

para petinggi kerajaan serta mengangkat mereka menjadi para abdi kerajaan Portugis. Setelah mereka dipermandikan menjadi katolik, Pater Jacinto mengadakan perjanjian dengan raja Kupang dan para petinggi kerajaan pada tanggal 29 Desember 1645, bahwa bangsa Portugis diizinkan untuk membangun gereja dan benteng di Kupang, kapal-kapal Islam dan kapal-kapal bangsa lain dilarang untuk singgah di Pelabuhan Kupang. Kota Kupang lalu diduduki Portugis. Tetapi kota Kupang dan bentengnya kemudian diduduki dengan mudah oleh Kompeni Belanda pada tahun 1653, karena pemerintahan Portugis yang berada di bawah kendali rohaniah Pater Antonio de S. Jacinto menderita ketiadaan bantuan keuangan dan kekuatan militer untuk misi di Kupang.

Kesulitan yang dihadapi oleh Pater Antonio dan militer Portugis di Kupang sudah menjadi kesulitan dan tantangan umum dalam karya misi di kepulauan Solor. Serangan yang bertubi-tubi terhadap pusat misi di Lohayong (Solor) dan di Larantuka baik dari pasukan militer VOC maupun dari pasukan militer Islam atau juga dari persekutuan Islam dan VOC sudah menguras banyak tenaga dan kemampuan finansial bangsa Portugis dan misi Solor untuk bertahan. Banyak misionaris Dominikan dibunuh. Persenjataan militer Portugis sudah banyak dipakai untuk membela dan mempertahankan diri, sementara bantuan persenjataan dari luar sulit masuk ke tangan bangsa Portugis karena perairan Indonesia sudah dikuasai VOC dan Islam. Kekuatan keuangan melemah karena tidak ada bantuan keuangan lagi dari luar, sementara tuntutan untuk memelihara dan merawat pusat-pusat dan stasi-stasi misi tidak terpenuhi, gaji-gaji untuk para petugas pemerintah dan para petugas gereja tidak terbayar.

Setelah Makasar, kubu Portugis, jatuh ke tangan VOC Belanda pada tahun 1668, banyak orang katolik Makasar mengungsi ke Larantuka. Mereka membawa serta tradisi katolik Portugis dan Bahasa Melayu ke Larantuka. Tetapi situasi sosial katolik di Larantuka pada saat ini sangat memprihatinkan dan menyedihkan. Terjadi ketegangan hebat antara para pastor Dominikan dan umat katolik setempat, dan ketegangan ini berujung pada kekerasan dan pengrusakan gereja. Gereja San Lorenzo di Lewonamang dan di Gege (Larantuka) diserbu oleh sekelompok orang bersenjata di bawah pimpinan Antonio d'Ornay dan Baltazar Enriques. Dua pastor Dominikan dibelenggu, yaitu P. Juan de Rozario OP dan P. Philip de Jesus OP (Sejarah Gereja...Muskens p. 400-402). Setelah lepas dari belenggu, P. Juan de Rozario dikejar untuk dibunuh oleh seorang pemuka umat tapi tidak berhasil. Tidak diketahui lagi keberadaan kedua pastor Dominikan itu selanjutnya. Pada bulan Januari tahun 1670 dua imam Fransiskan (P. Augustinus de S. Paschual dan P. Juan de la Camara) dalam pelayaran menuju Tiongkok via Jepara terdampar di Larantuka oleh karena kapal yang ditumpanginya terhempas ombak dan digebrak hantaman angin topan, dan pada saat berada di Larantuka tidak diberitakan jelas apakah kedua imam Dominikan yang dibelenggu itu masih ada di Larantuka, tapi dengan ketiadaan imam Dominikan itu, mulailah babak baru umat katolik di Larantuka dan di wilayah misi Solor untuk hidup tanpa

gembala tetap hingga 1860. Sekitar dua abad tidak ditemukan imam-imam yang tinggal tetap sebagai gembala di Larantuka.

Dalam jangka waktu yang panjang ini, kebutuhan umat katolik untuk memiliki gembala yang tetap sangat mendesak di Flores dan Timor. Pada tanggal 20 September 1703 gubernur Portugis di wilayah Timor Timur, Antonio Coelho de Guerreiro, mengeluarkan sepucuk surat permohonan kepada pembesar Dominikan di Goa untuk mendatangkan misionaris Yesuit atau Carmelit ke Flores dan Timor. Surat permohonan ini senada dengan desas desus di sekitar tahun 1677 bahwa para Yesuit akan dikirim ke Larantuka untuk mengisi kekosongan imam di sana. Reaksi para pemuka umat katolik di Larantuka dituangkan dalam sebuah petisi para pemuka umat katolik kepada pembesar Dominikan di Goa, bahwa penduduk setempat hanya bersedia menerima para Dominikan yang telah menobatkan nenek moyangnya menjadi Katolik, sementara surat permintaan gubernur itu diprotes keras oleh Provinisial Dominikan di Goa. Dengan demikian, umat katolik di Larantuka dan di sekitarnya tidak mendapat pelayanan sakral untuk satu jangka waktu yang tidak jelas. Tetapi dalam Sejarah Gereja Katolik Indonesia dicatat bahwa antara tahun 1690-1770 sekelompok misionaris Fransiskan datang ke Timor dan Flores, dan kebanyakan mereka mati di tempat ini. Hal itu berarti bahwa satu dua misionaris Fransiskan pasti datang ke Larantuka, tetapi mereka tidak bisa tinggal sebagai imam tetap di sana.

Setelah keruntuhan VOC di Indonesia pada tahun 1799, seluruh wilayah yang berada di bawah kekuasaan VOC diambilalih oleh pemerintah Belanda. Umat katolik yang ditekan pada masa kekuasaan VOC mendapat kebebasan bergerak dan beriman secara leluasa di bawah pemerintahan Hindia Belanda yang diresapi semangat revolusi Perancis 1789. Keuskupan Malaka yang membawahi umat katolik di Flores dan Timor dihapuskan pada tahun 1838, dan pusat keuskupan lalu berpindah ke Goa, India. Beberapa imam diosesan asal Goa yang bertugas di Dili, Timor Timur, mendapat kesempatan untuk berkunjung ke Larantuka dan Sika. Salah seorang imam Projo asal Dili, P. Gregorio Maria Bareto, ketika mengunjungi Larantuka, berperan besar sebagai salah satu wakil dari pemerintah Portugis di Timor Dili dalam peristiwa serah-terima stasi Wureh di Adonara dan Larantuka di Flores dari penguasa Portugis kepada penguasa Belanda pada tanggal 7 Desember 1851 di Larantuka. Penguasa Belanda diwakili oleh komandan kapal perang "Merapie", H.J. van Maldeghem, memberi kata sambutan dalam peristiwa serah-terima dan berkata antara lain: "*Agama Roma Katolik akan dipertahankan sebagaimana sebelumnya, karena pemerintah Belanda terikat perjanjian dengan bangsa Portugis bahwa agama ini mesti diakui*" (Jebarus, 2017:37). Sementara itu, pada kesempatan yang sama berkatalah Pater Gregorio Maria Bareto kepada umat katolik di Larantuka: "*Anda boleh berganti bendera, namun anda tidak pernah boleh berganti agama*"

(Jebarus, 2017:38). Bendera Belanda dikibarkan di Larantuka pada 16 Desember 1851.

Pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia membawa angin segar ke dalam tubuh gereja katolik di Indonesia. Untuk gereja katolik di kepulauan Sunda Kecil, dengan pembentukan Vikariat Apostolik Batavia pada 3 April 1842 di wilayah pemerintahan Hindia Belanda atas restu takhta suci di Roma, umat katolik di wilayah kepulauan Sunda Kecil mendapat perhatian resmi lagi dari Roma. Seorang imam projo Belanda, P. Gaspar de Hessele, ditugaskan oleh Vikaris Apostolis Batavia, Mgr. Petrus Maria Vranken, Pr., untuk mengunjungi orang katolik di wilayah Hindia Belanda bagian timur (Sulawesi, Maluku dan Nusa Tenggara) pada tahun 1853. Pater Hessele tiba di Larantuka dan mempermandik banyak orang. Sekembalinya ke Batavia, beliau melaporkan jumlah umat katolik di Larantuka dan sekitarnya kurang lebih 3000 orang dan memberi kesan bahwa kekatolikan mereka hanya nama “katolik”, karena mereka hanya mendapat pelayanan sakral sekali dalam enam tahun.

Setelah Pulau Flores, Adonara, Solor, Lombok (Lembata), dan pulau-pulau sekitar secara resmi menjadi milik Belanda atas dasar ratifikasi parlemen Belanda 23 Agustus 1860 terhadap rumusan kontrak Lisabon (6 Oktober 1854) antara Belanda dan Portugis menyangkut wilayah-wilayah yang masih menjadi milik Portugis, maka pada tahun yang sama (1860) Vikaris Apostolik Batavia, Mgr. Petrus Maria Vranken, Pr., mengutus secara resmi seorang imam projo Belanda, P. Joannes Petrus Nicolaus Sanders, Pr., untuk menjadi pastor tetap di Larantuka. Dia tiba di Larantuka pada tanggal 4 Agustus 1860. Pengutusannya yang resmi dan kehadirannya yang tetap sebagai gembala di Larantuka membuka babak baru lagi kehadiran klerus dan hirarki gereja. Di Larantuka Pater Sanders berurusan juga dengan 17 stasi dengan 17 kapela di luar kota Larantuka, termasuk kapela San Juan di Maumere dan kapela Mayor San Dominggo di Sika. Dengan adanya instruksi pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1854 untuk membuka sekolah demi kepentingan anak pribumi, Pater Sanders berani mendirikan sekolah di Larantuka untuk mendidik anak-anak pribumi supaya mereka mampu “membaca, menulis dan berhitung”, meskipun sekolah ini dicap “sekolah liar” karena belum mendapat izinan dari pemerintah Hindia Belanda (Jebarus, 2008:23-27).

Pater Sanders tidak bekerja lama di Larantuka, karena beliau sakit-sakit, tetapi dalam kurun waktu yang singkat itu, dia tidak menghilangkan semua kebiasaan hidup keagamaan yang diwariskan oleh misionaris Dominikan Portugis. Upacara pekan suci dengan prosesi jumat agung masih tetap dijalankan; devosi kepada Maria Ratu Rosario dipertahankan. Pater Sanders mempunyai kebijaksanaan pastoral dalam rangka memurnikan iman katolik dari paraktek-praktek keagamaan yang mungkin keliru dengan moto “*tollatur abusus, maneatus*” (semoga yang keliru dibuang, yang bermanfaat tinggal). Iman katolik sejati tidak pernah bebas dari praktek-praktek dan kebiasaan hidup yang membungkai penghayatan hidup para penganutnya.

2.4 Gereja Katolik di Kepulauan Sunda Kecil dalam Periode 1860 – 1913

Dalam periode 1860-1913, gereja katolik di kepulauan Sunda Kecil berada di bawah kewenangan kekuasaan Vikariat Apostolik Batavia yang dibentuk oleh Sri Paus pada tanggal 20 September 1842. Umat katolik di kawasan ini berada dan hidup di wilayah gugusan pulau-pulau di propinsi NTT. Dua imam Projo Belanda, yaitu Pastor Sanders, Pr., dan Pastor Caspar J. H. Franssen, Pr., yang ditugaskan secara resmi oleh uskup Batavia, bekerja sebagai pastor tetap di Larantuka hingga tahun 1863, dan sejak tahun 1863 dengan kedatangan seorang imam Yesuit, yaitu Pastor Gregorius Metz, SJ., di Larantuka, mulai berkiprah misi Yesuit di wilayah kepulauan Sunda Kecil hingga tahun 1913, tepatnya tanggal 16 September 1913, ketika didirikan Prefektur Apostolik Kepulauan Sunda Kecil, wilayah bawahan dari Vikariat Apostolik Batavia. Pulau Flores pada tahun ini belum termasuk bagian dari wilayah Prefektur Apostolis Kepulauan Sunda Kecil dan baru masuk ke dalam wilayah Prefektur Apostolis Kepulauan Sunda Kecil pada tanggal 20 Juli 1914 atas dasar keputusan Konggergasi Propaganda Fide (Vriens, 1972:146 bdk.Jebarus, 2017:xxi).

Bagaimana perjalanan karya misi di Pulau Bali dan Pulau Sumba? Dalam Sejarah Gereja Katolik Indonesia dicatat bahwa pada awal tahun 1635 ada sebuah kapal Portugis yang singgah di Pulau Bali dalam pelayaran dari Bima ke Malaka. Penumpang kapal diterima baik oleh orang Bali, dan ketika kapal itu meninggalkan Bali, raja muda Bali, Xabandar, menitipkan suratnya kepada pemerintahan Portugis di Malaka: “*Saya akan senang sekali, jika mulai sekarang kita bersahabat baik dan jika orang datang ke Pelabuhan sini untuk berdagang.....Saya pun akan merasa sangat senang sekali, jika imam-imam datang ke sini, agar siapa saja yang menghendaki dapat memeluk agama Kristen.*”(Bagian Dokumentasi, 1974:345). Isi surat ini tentu sangat menggembirakan para petinggi gereja katolik di Malaka, dan karena itu, atas persetujuan pembesar ordo Yesuit di Kochin, India, dua misionaris Yesuit, yaitu P. Manuel de Azevedo SJ dan P. Carvalho SJ diutus ke Bali. Mereka tiba di Bali pada tahun 1635. Tidak ada keterangan lebih lanjut tentang tempat tinggal mereka di Bali dan tidak diketahui juga apakah ada orang Bali yang dipermandikan oleh mereka untuk menjadi katolik. Dicatat saja bahwa tahun 1636 sudah ada delegasi Bali ke Betawi untuk menjalin hubungan dengan Kompeni Belanda, dan kemungkinan besar, ada larangan kompeni Belanda terhadap kedua misionaris Yesuit itu untuk menetap di Pulau Bali. Diberitakan saja bahwa tahun 1638 Pater de Azevedo SJ sudah berada di Travancore, India, sementara Pater Carvalho SJ sudah berada di Ternate tahun 1639 (Bagian Dokumentasi, 1974:345-346). Pada tahun 1870 menetap di Buleleng, Bali, seorang cendekiawan linguistik Belanda, Herman Neubronner van der Tuuk, yang bekerja sebagai pegawai pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia. Dia sedang menyusun “*Kawi-Balineesch-Nederlandsch Woordenboek*”(Kamus Bahasa Kawi-Bali-Belanda). Dia

mencermati bahwa misi Protestan tidak cocok di Bali, dan menawarkan kursus Bahasa Bali untuk misionaris katolik yang bersedia menetap di Bali untuk memulai karya misi katolik di Bali, tetapi tidak seorang pun dari misionaris katolik datang ke sana (Steernbrink, 2003:111). Oleh karena desakan van der Tuuk, Vikaris Apostolik Batavia yang ketiga, Mgr. Claessens, Pr., pada permulaan tahun 1891 menanyakan pemerintahan Hindia Belanda di Bali dalam diri Pijnacker Hordijk apakah dua misionaris katolik bisa menetap di Bali untuk memulai misi katolik di sana. Si residen Belanda itu tidak berkeberatan, tapi berpendapat bahwa misi Zending Protestan di bawah pendeta Vroom terhenti oleh karena pembunuhan terhadap pendeta Vroom oleh seorang Bali yang sudah memeluk agama Kristen. Misi katolik akhirnya tidak dimulai di Bali, dan rencananya akan datang misionaris Yesuit, P. Le Cocq d'Armandville, ke Bali, tapi gagal oleh karena kematian yang tragis Pater d'Armandville di tanah Papua. Misi katolik di Bali baru mulai tahun 1935 (Vriens, 1972:202).

Mengenai misi gereja katolik di Pulau Sumba, datanglah Pater Leemker, SJ, dari Larantuka ke Waingapu di Pulau Sumba pada Agustus 1885. Sebelum tahun ini, di Sumba sudah berkarya Zending Protestan, tapi hasil tidak seberapa. Pater Leemker mengunjungi beberapa tempat di Sumba Timur, tapi tidak diberitakan apakah dia berhasil mempermandikan orang untuk menjadi katolik. Atas izinan Gubernur Jendral G.G.van Rees, sebuah stasi di Sumba Barat, yaitu Laora, diberikan kepada misi gereja katolik, dan dua misionaris Yesuit, P. Schweitz SJ dan Bruder Busch SJ dan 7 anak laki-laki dari Larantuka datang ke sana hari Paska 1889 dan menetap di Laora. Pater Schweitz berhasil mempermandikan 780 anak pada tahun 1889. Raja Laora, yaitu Oombo Koondi, yang menjadi juru Bahasa untuk kedua misionaris Yesuit itu, tidak menunjukkan kerja sama yang baik dengan para misionaris itu pada tahun-tahun berikutnya, bahkan bersama dua raja yang lain dari wilayah itu, mereka (raja Laora dan kedua raja lain) tidak berminat untuk memeluk agama Kristen, karena mereka hidup dalam poligami. Tetapi mereka menghantar anak-anak yang sudah dipermandikan kepada misionaris Yesuit itu untuk mendapat pelajaran agama katolik, dan atas dasar pengalaman ini, Pater Schweitz membuka sekolah untuk anak laki-laki di Laura pada tahun 1891, dan pada tahun 1898 Pater van der Velden SJ membuka sekolah untuk anak puteri (Vriens, 1972:203-205 bdk. Steenbrink, 2003:283-284). Oleh karena alasan keamanan hidup para misionaris di Laura, maka misionaris Yesuit meninggalkan Sumba pada tahun 1898, dan ketika dibentuk Prefektur Apostolik Kepulauan Sunda Kecil, misi Sumba diserahkan pada tanggung jawab SVD (Serikat Sabda Allah). Tetapi pada tahun itu, SVD dilarang untuk masuk Sumba, karena di sana sudah ada Zending Protestan yang mengelola Pendidikan agama Kristen sesuai dengan *"Peraturan Flores-Sumba (Flores-Soemba Regeling)"* yang ditetapkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, A.F. van Idenburg pada tanggal 31 Maret 1913 tentang pemberian subsidi pemerintah untuk sekolah-sekolah di Flores dan di Sumba. Peraturan ini diumumkan dalam Lembaran

Negara tahun 1913 No. 309. Isi pokok dari peraturan Pemerintahan Hindia Belanda ini adalah bahwa pengelolaan persekolahan di Flores diserahkan kepada misi para pastor Yesuit dan di Sumba kepada “*Zending Protestan*”. Misi gereja katolik mulai berkarya lagi di Sumba baru pada tahun 1929 di bawah tanggung jawab Serikat Sabda Allah (SVD).

Vikaris Apostolik Batavia, Mgr. P.M. Vrancken, Pr., menulis laporan kepada Propaganda Fide pada tanggal 12 Januari 1866 tentang stasi Larantuka sebagai salah satu stasi dari 8 stasi di bawah kekuasaan Vikariat Apostolik Batavia di seluruh wilayah pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia. Stasi Larantuka mencakup wilayah orang katolik yang mendiami Pulau Flores, Timor, Sabu, Rote, Adonara, Solor, Lembata dan lain-lain. Dalam laporannya, Mgr. Vrancken menyebut orang katolik di sana sebagai “*orang Kristen yang malang*”, karena mereka hanya mendapat pelayanan sakramental dari seorang pastor katolik sekali dalam 4 sampai 12 tahun atau jarang sekali mendapat pelayanan itu. Mereka hanya katolik nama saja. Meskipun begitu, mereka punya kehendak baik dan bersympati terhadap iman katolik. Penduduk pedalaman Flores dan sebagian penduduk di pulau-pulau sekitar belum menerima permandian dan disebut saja “*kafir*” (wilayah Demon Lewo Pulo), sementara penduduk wilayah Paji (Paji Watang Lema) sudah jelas Islam. Uskup itu melaporkan bahwa pada tahun 1864 jumlah umat katolik di stasi Larantuka 11200 orang; penyambutan komuni 363 orang; permandian 560 orang; perkawinan 38 pasangan (Vriens, 1972:242-243).

Situasi sosial-politis-religius masyarakat katolik di stasi Larantuka yang meliputi wilayah Sikka dan Timor di bawah karya para pastor dan bruder Yesuit sejak tahun 1863 hingga tahun 1914 cukup baik untuk pengembangan iman katolik, meskipun terdapat banyak problem yang mendera kehidupan iman umat. Di wilayah Larantuka dan sekitarnya, termasuk Pulau Adonara dan Solor, tradisi keagamaan yang diwariskan oleh para misionaris Dominikan masih hidup dan berpengaruh besar dalam kehidupan iman umat. Sebuah organisasi awam yang dikenal dengan nama “*Confreria Renha Rosario*” (Paguyuban Rosario Suci) memiliki struktur organisasi yang rapi. Organisasi ini diketuai oleh raja Larantuka dengan anggota-anggota dari kalangan suku-suku tertentu yang memiliki tugas-tugas khusus dalam upacara keagamaan. Organisasi inilah yang menjaga iman katolik selama tidak ada imam tetap di Larantuka, dan dengan kedatangan misionaris Belanda baik imam projo maupun imam Yesuit, organisasi konfreria di bawah kepemimpinan raja Larantuka tetap memandang tradisi upacara keagamaan sebagai berada di bawah kewenangan mereka dari pada kewenangan pastor. Ada tiga upacara keagamaan yang dirayakan secara meriah di bawah kewenangan dan kepemimpinan organisasi konfreria ini, yaitu perayaan Natal; perayaan Jumat Agung dalam Semana Santa; perayaan pesta Rosario 7 Oktober (Steenbrink, 2003:135-152). Para pastor pada masa ini mendapat kesan bahwa perayaan ketiga pesta itu menelan biaya besar yang berlebihan dan diwarnai dengan pesta pora dan minum mabuk. Liturgi resmi seperti perayaan ekaristi yang

menjadi kewenangan pastor katolik terpinggirkan dengan sendirinya oleh karena dominasi organisasi itu di bawah kewenangan raja Larantuka. Para pastor katolik pada masa ini berhadapan dengan soal itu bila berurusan dengan perayaan keagamaan di sana. Pada tahun 1870-an para pastor Yesuit Belanda berusaha menerapkan devosi-devosi baru seperti perayaan Corpus Christi dan penghormatan kepada Hati Kudus Tuhan Yesus untuk mengimbangi tradisi perayaan warisan Dominikan dan membentuk organisasi baru semacam Dewan Gereja yang melibatkan anggota-anggota Confreria, tapi usaha mereka ini tidak terlalu berhasil. Tradisi religius yang diwariskan Portugis terlalu kuat meresap di dalam hati umat katolik di sana.

Di bidang politik terdapat dua penguasa katolik yang sangat berpengaruh baik dalam urusan pemerintahan sipil maupun dalam urusan keagamaan katolik yang diperankan oleh para pastor katolik. Dua penguasa katolik itu adalah raja Larantuka dan raja Sikka (Maumere), meskipun sejak awal abad ke 17 raja Larantuka dipandang sebagai berstatus lebih tinggi dari raja Sikka (Steenbrink, 2003:230). Antara tahun 1859 hingga 1904, raja-raja Larantuka menjaga martabat dan kedaulatannya di wilayahnya dengan berpihak kepada para pastor katolik, meskipun hidup perkawinan mereka yang berpoligami dikritik oleh para pastor katolik. Para raja ini membawahi raja-raja kecil di wilayah ini, dan saingan beratnya adalah raja Adonara yang beragama Islam. Sengketa tanah yang dijadikan batas-batas wilayah kerajaan tidak terselesaikan dengan baik, dan perang yang senantiasa berkecamuk di antara para penguasa wilayah kerajaan itu sudah merupakan hal biasa pada masa itu. Keadaan ini dipersulit lagi dengan konflik kekuasaan antara raja-raja itu, para pastor katolik dan pemerintahan kolonial Hindia Belanda yang diwakili oleh administrator sipil setempat sebagai perpanjangan tangan dari Residen Kupang dan Gubernur Jendral di Batavia. Di satu pihak para raja hendak mempertahankan otonomi politik di wilayahnya, dan di pihak lain pemerintahan Hindia Belanda melalui administrator sipil dan residen Kupang yang protestan ingin menguasai seluruh aktivitas hidup para raja itu. Sementara itu, para pastor katolik yang digaji oleh pemerintahan Hindia Belanda menaruh kecurigaan terhadap para administrator sipil dan Residen Kupang yang protestan, karena mereka ini menggalakkan semangat protestantisme di kalangan masyarakat katolik ketika mereka membuat kunjungan ke wilayah-wilayah katolik di Timor dan di Flores, seperti yang dilakukan oleh Residen Kupang, Isaac Esser, yang menjelek-jelekkan agama katolik Roma dengan mengatakan bahwa agama katolik Roma tidak punya makna dan orang harus menganut agama baru, yaitu Protestan (Steebrink, 2003:176).

Mengenai misi gereja katolik di Pulau Timor pada masa ini, Pater Dijckman dari Larantuka mengunjungi Pulau Timor dan tiba di Atapupu 4 Juli 1875, dan kemudian Pater Kraaijvanger melakukan kunjungan yang sama ke Pulau Timor dua kali dari Larantuka pada tahun 1879 dan tahun 1880 (Steenbrink, 2003:305-317). Kedua pastor ini tentu mendapat cerita dari penduduk setempat bahwa

nene moyang mereka pada zaman misionaris Portugis beragama katolik. Pastor Dijckman dan Pastor Kraaijvanger melaporkan berita ini kepada uskup Claessens di Batavia, dan atas laporan kedua pastor itu uskup ini menulis surat kepada Gubernur Jendral di Batavia pada tanggal 31 Januari 1881 untuk meminta beliau agar beliau mengizinkan dibukanya misi katolik di Atapupu untuk melayani kepentingan umat katolik di Pulau Timor yang berada di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Permintaan itu dikabulkan pada tanggal 15 September 1881 untuk wilayah Timor Tengah tanpa batasan territorial yang jelas, khususnya wilayah Janilo dan Failaran, dan dengan demikian diputuskan Pater Kraaijvanger untuk menetap di Atapupu, di wilayah Failaran, pada 21 April 1883. Atapupu menjadi pusat misi katolik di Timor. Dia membangun gereja dan sekolah di sana, dan dari Atapupu, karya misi katolik menyebar ke wilayah lain, khususnya pada tahun 1891 dibuka stasi katolik di kampung Lahirus. Pada tanggal 19 September 1893 dikeluarkan surat keputusan Gubernur Jendral di Batavia bahwa seluruh wilayah Belu di Pulau Timor menjadi wilayah misi katolik.

Perlu disebutkan secara khusus bahwa misi gereja katolik di kepulauan Sunda Kecil di bawah karya para misionaris Belanda Yesuit pada periode ini sangat sinyifikan di bidang Pendidikan. Ketika kebijakan pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1854 memuat instruksi mendirikan sekolah untuk rakyat pribumi di Indonesia, maka para misionaris yang bekerja di wilayah ini memanfaatkan peluang yang ditawarkan pemerintahan Hindia Belanda. Sekolah pertama yang mendapat izinan dari pemerintahan Hindia Belanda didirikan oleh Pastor Caspar Johannes Fransiscus Franssen di Larantuka pada 3 Desember 1862 dengan 25 murid (24 putera dan seorang puteri). Tujuh belas tahun kemudian, tepatnya bulan Mei 1879, sekolah pertama untuk kaum perempuan dibuka dan ditangani oleh para suster dari Ordo Fransiskanes Semarang dengan jumlah murid 20 orang (Jebarus, 2008:32).⁶ Dalam kurun waktu sesudahnya, beberapa sekolah dibuka lagi di beberapa tempat di Flores.

Para misionaris yang mengelola sekolah-sekolah memberi pelajaran umum, yaitu membaca, menulis dan berhitung. Tetapi di samping itu, mereka menyisipkan juga pelajaran agama untuk pendidikan iman katolik. Kenyataan ini diketahui oleh pemerintah Belanda yang telah melarang pelajaran agama di sekolah menurut peraturan yang dikeluarkan pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 3 Mei 1871. Peraturan larangan ini sejalan dengan kebijakan persekolahan yang bersifat sekular-liberal di tanah Belanda pada abad 19. Untuk membendung kegiatan para misionaris itu di bidang Pendidikan menyangkut pelajaran agama, pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan lagi dalam Lembaran Negara No. 224 pada tahun 1890, bahwa sekolah anak pribumi seperti

⁶ Sekolah Puteri dibangun di Larantuka oleh para biarawati dari Ordo Fransiskanes Semarang bersamaan dengan tahun kelahiran pelopor kemerdekaan puteri Indonesia, Raden Ajeng Kartini, 21 April 1879.

yang dikelola oleh para misionaris bisa mendapat subsidi dari pemerintah Belanda, tapi sekolah itu tidak boleh berasaskan pada agama dan sesekwatu harus ditinjau juga oleh komisi sekolah pemerintah. Kebijakan pemerintah Belanda seperti itu disikapi oleh para misionaris dengan hati-hati dan enggan untuk mengikuti ketentuan pemerintah itu oleh karena ketakutan mereka akan kehilangan azas kekatolikan pada sekolah yang mereka kelola.

Dalam perkembangan lebih lanjut, pemerintah baru di Batavia di bawah gubernur jenderal J.B. Van Heutz (1904-1909) memberi perhatian khusus terhadap daerah-daerah di luar Jawa. Di bidang Pendidikan, beliau menciptakan sekolah jenis khusus pada tahun 1907 dengan nama "*Desaschool*" atau Sekolah Desa pengganti "*Volksschool*" (Sekolah Rakyat). Sekolah jenis ini harus didirikan di desa-desa. Seorang pengawas pemerintah, Hendrik Colijn, diutus ke Larantuka untuk membangun jejaring persekolahan antara pemerintah, misi katolik dan Zending Protestan. Ketika pengawas itu tiba di Larantuka pada 23 Agustus 1906, dia begitu tercengang dan kagum akan usaha Pendidikan yang dikelola oleh para misionaris. Dia mendorong misi katolik untuk terus membangun sekolah-sekolah. Dia berkata: "*Anda dipersilahkan membangun sekolah-sekolah katolik, namun tidak boleh menjadi sekolah gerejani*" (Jebarus, 2008:43).

Reaksi para misionaris terhadap pernyataan pengawas itu berbeda-beda. Meskipun demikian, dalam rangka untuk membangun jejaring persekolahan misi katolik dan pemerintahan Hindia Belanda, pada tanggal 1 Mei 1911 didirikan organisasi sekolah katolik Roma Flores dengan nama "*R.C. Schoolvereinigung Flores*", yang kemudian diakui secara resmi sebagai sebuah Yayasan publik oleh pemerintah Hindia Belanda. Organisasi ini dipimpin oleh Pater Jos Hoeberchts, SJ, sebagai direktur dan Pater van der Velden, SJ, sebagai sekretaris. Dengan adanya organisasi ini, tersedia lah jalur resmi untuk kerja sama antara misi katolik dan pemerintah Hindia Belanda.

Ketika terjadi peralihan pengembangan misi katolik di Pulau Flores dari tangan para misionaris Yesuit kepada para misionaris Serikat Sabda Allah (SVD) pada tanggal 20 Juli 1914, pengelolaan persekolahan katolik di Flores diserahkan kepada tanggung jawab para misionaris Serikat Sabda Allah. Tetapi ketentuan "*Flores-Sumba Regeling*" tidak sepenuhnya diterima oleh pemerintah Hindia Belanda oleh karena adanya perubahan peta politik di tanah Belanda dari kelompok kabinet yang berhaluan kanan ke kelompok kiri yang berhaluan liberal-sekular. Menteri untuk urusan koloni Belanda di tanah jajahan tidak setuju dengan kontrak "*Flores-Sumba Regeling*" yang menurutnya meniadakan wewenang dan hak pemerintah Hindia Belanda untuk membuka sekolah-sekolah negeri di wilayah Flores. Ketidaksetujuannya itu kemudian dituangkan dalam penetapan peraturan persekolahan oleh Gubernur Jenderal Batavia atas nama Ratu Belanda pada tanggal 28 Oktober 1915. Beberapa butir dari peraturan itu antara lain: subsidi keuangan negara tetap disalurkan untuk sekolah-sekolah di Flores;

pembukaan sekolah baru harus mendapat izinan dari pemerintah; pemerintah berhak untuk mengawasi sekolah-sekolah setempat; pemerintah berwewenang untuk mendirikan sekolah negeri. De facto, ketentuan untuk membuka sekolah negeri di Flores tidak terealisir hingga akhir penjajahan Belanda di Indonesia (Jebarus, 2008: 49-52.301-309).

2.5 Gereja Katolik di Kepulauan Sunda Kecil dalam Periode 1913 – 1949

Periode ini dihitung sejak pembentukan Prefektur Apostolik Kepulauan Sunda Kecil, kecuali Pulau Flores, pada tahun 1913, sampai dengan penyerahan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada tahun 1949. Prefek Apostolik Kepulauan Sunda Kecil yang diangkat oleh Paus melalui Propaganda Fide untuk memimpin umat katolik di kepulauan Sunda Kecil adalah Mgr. Petrus Noyen, SVD (1913-1921). Di bawah kepemimpinan Mgr. Petrus Noyen, SVD, misi gereja katolik dipercayakan penuh kepada para misionaris Serikat Sabda Allah (SVD) untuk berkarya di wilayah Kepulauan Sunda Kecil, dan kemudian termasuk juga Pulau Flores tahun 1914. Beberapa target karya misi dicanangkan oleh Mgr. Petrus Noyen, SVD, untuk diterapkan. Penduduk yang masih menganut agama tradisional di wilayah ini diyakinkan untuk menganut agama katolik. Untuk menanamkan dasar misi yang kokoh didatangkan para misionaris yang berkwalitas baik. Relasi para misionaris dengan pemerintahan Hindia Belanda harus dijalin baik. Juga relasi dengan para tua adat dan raja setempat perlu dibangun secara baik. Belajar Bahasa setempat merupakan suatu keharusan untuk para misionaris (Camnahas, 2020:26-129).

Ketika Pater Petrus Noyen, SVD, tiba di Larantuka tahun 1913 dan kemudian berada di Larantuka pada tahun 1916, dia membuat laporan kepada Pater General Superior SVD di Roma, bahwa misi di Timor cukup memuaskan dan wilayah misinya luas. Orang-orang Timor biasa menghadiri misa pada hari minggu dengan pakaian yang layak dan menghayati hidup moral yang tinggi, khususnya hidup perkawinan dengan satu isteri, di mana isteri tidak diperlakukan sebagai budak. Larantuka di Flores Timur merupakan pusat misi pada waktu itu dengan komunitas Kristen tertua, tapi komunitas Kristen ini berkembang baik dan kokoh (Camnahas, 2020:132-133). Misi di kepulauan Sunda Kecil menurut Mgr. Petrus Noyen, SVD, dipandang sebagai sebuah lahan yang subur untuk penyebaran iman kristiani. Pengembangan misi ke arah barat Pulau Flores mendapat perhatian serius dalam tugas kepemimpinan Mgr. Petrus Noyen, SVD, untuk membendung ekspansi Islam ke pedalaman Pulau Flores. Untuk tujuan itu, pusat misi katolik yang pada waktu itu berada di Larantuka, Flores Timur, berpindah ke Ndona, Ende, pada tahun 1915.

Karena wilayah misi di Kepulauan Sunda Kecil luas dan terdapat kekurangan tenaga misionaris yang berkarya di wilayah ini, maka Mgr. Petrus Noyen, SVD, secara regular setiap tahun menulis surat kepada Pater General Superior di Roma, P. Nicolaus Blum, SVD, untuk mengirim misionaris Serikat Sabda Allah ke

wilayah ini, yaitu ke Timor, Flores dan Sumba. Perang dunia pertama 1914-1918 merintangi kedatangan misionaris Serikat Sabda Allah, meskipun sebelum dan selama bekercamuknya perang dunia pertama sudah ada beberapa misionaris SVD yang berkarya di Flores seperti di Larantuka dan di Ndona dan di Timor seperti di Atapupu, Lahurus dan Belu Selatan. Tahun 1922 adalah era baru kehidupan menggereja di Kepulauan Sunda Kecil. Status Prefektur Apostolik Kepulauan Sunda Kecil dinaikkan oleh Propaganda Fide menjadi Vikariat Apostolik Kepulauan Sunda Kecil dengan pemimpin wilayah Vikariat, Mgr. Arnoldus Vestraelen, SVD, sebagai Vikaris, setelah Mgr. Petrus Noyen meninggal dunia di Steyl, Belanda, pada 24 Februari 1921. Era ini ditandai juga oleh kedatangan sejumlah misionaris SVD yang sudah berpengalaman di misi Afrika (Togo dan Mozambique) untuk berkarya di wilayah Kepulauan Sunda Kecil. Dengan kedatangan mereka, dibukalah stasi-stasi misi yang baru di wilayah ini dengan akibat bahwa perkembangan kehidupan menggereja baik secara kwantitatif maupun secara kualitatif cukup menggembirakan. Jumlah umat katolik di Kepulauan Sunda Kecil pada tahun 1914 adalah 32,368 orang, dan di tahun 1922 jumlahnya sudah mencapai 63,837 orang, sementara jumlah pembaptisan pada tahun 1914 adalah 2,862 orang, dan pada tahun 1922, jumlahnya mencapai 7,308. Para imam SVD yang berkarya di wilayah ini pada tahun 1914 berjumlah 14 orang, sementara pada tahun 1922 jumlahnya menjadi 36 orang. Stasi baru di Mataram, Lombok, dibuka pada tahun 1935 dengan pastor pertama P. Johannes van der Heyden, SVD, di Denpasar, Bali, pada tahun 1935 dengan pastor pertama P. Johannes Kersten, SVD, dan di Tuka, Bali pada tahun 1936 dengan pastor pertama P. Johannes Kersten, SVD, dan P. Simon Buis, SVD (Camnahas, 2020:140-154).

Perkembangan jumlah umat katolik yang begitu pesat beriringan dengan pemusatan perhatian para misionaris terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan sekolah di wilayah ini. Di bawah tanggung jawab para misionaris SVD, persekolahan katolik di Flores berkembang pesat dan mengesankan. Sejak berdirinya Standaardsschool pada bulan Mei 1915 di Ndona, Ende, untuk anak-anak dari Ende, Lio, Ngadha dan Manggarai, sekolah desa lalu dibuka di mana-mana di seluruh pulau Flores (Sermada, 2018:197-202). Hingga tahun 1918 sudah ada 60 Sekolah Desa di seluruh pulau Flores yang dalam struktur kepemerintahan Hindia Belanda terbagi ke dalam 7 wilayah kepemerintahan (Onderaufdeling). Wilayah Flores Timur sendiri terbagi dalam dua wilayah kepemerintahan (Onderaufdeling), yaitu Onderaufdeling Flores Timur dan Solor dengan 11 Sekolah Desa (Larantuka 1 untuk Putera; Larantuka 2 untuk Puteri; Lewoloba; Lebao; Waibalun; Bama; Lewolaga; Riangwulu; Hewa; Lewotala; Lamakera di Solor); Onderaufdeling Adonara dan Lomblen (Lembata) dengan 11 Sekolah Desa (Lamahala; Waiwadan; Lewopulo; Sagu; Terong; Waiwerang; Wayangone; Lite; Kalikur; Waipukang dan Lamalera).

Untuk Pulau Adonara, penerapan peraturan “Flores-Sumba Regeling”, bahwa persekolahan di Flores diserahkan penuh untuk dikelola oleh misi katolik, ditolak oleh raja Adonara yang memandang seluruh penduduk Adonara beragama Islam. Peraturan itu tidak berlaku untuk Adonara hingga tahun 1923, ketika pada tahun 1925 diadakan sensus penduduk di Adonara atas keputusan pemerintahan Hindia Belanda melalui residen pemerintahan Belanda di Kupang. Dalam sensus ini ditemukan fakta, bahwa di Adonara penduduk yang beragama Islam berjumlah 15.000 orang, sementara yang beragama “*kafir*” (istilah pada waktu itu untuk penduduk yang belum dipermandikan menjadi katolik dan juga belum menjadi Islam secara resmi) berjumlah 36.500 orang. Karena itu, pemerintahan Hindia Belanda mengambil keputusan demi Pendidikan anak pribumi, bahwa atas dasar mayoritas penduduk di Adonara yang “*bukan-Islam*”, pendidikan di Adonara diserahkan kepada tanggung jawab misi katolik pada tahun 1926. Hal ini berdampak juga bahwa penduduk agama tradisional (kafir) di Adonara memeluk agama katolik.

Menurut Laporan P. J. Bouma, SVD, yang menjabat sebagai Inspektur Sekolah Misi 1930-1933, di seluruh Pulau Flores dan Pulau sekitarnya terdapat 251 Sekolah Desa. Sejak pengambilalihan pengelolaan persekolahan dari tangan Yesuit ke tangan Serikat Sabda Allah, hampir tiap lima tahun jumlah Sekolah Desa di seluruh Flores bertambah: 1915 (28 SD); 1920 (85 SD); 1925 (184 SD); 1930 (271 SD); 1932 (298 SD); 1932 (298 SD). Untuk Pendidikan keterampilan, misionaris Serikat Sabda Allah mendirikan Sekolah Pertukangan yang disebut “*Ambachtschool*” (untuk menjadi tukang kayu dan tukang besi) sebagai Pendidikan formal yang mendapat izin pemerintahan Hindia Belanda pada 23 November 1925. Dibuka pertama di Ende dengan nama “*Sekolah Pertukangan Santo Yosef*” pada 21 Juni 1926 dan pada tahun sesudahnya dibuka juga di Larantuka. Untuk kepentingan Pendidikan di Sekolah Desa dibutuhkan “*Sekolah Guru*” yang menghasilkan para guru yang mengajar di Sekolah Desa. Sekolah guru disebut “*OVO*” (Opleidingschool voor Volks-Onderwijzer) dan didirikan pertama di Larantuka pada tahun 1913, dan kemudian di Ndona (Wilayah Ende-Lio) pada tahun 1920 dan di Lela (Maumere) pada tahun 1922. Untuk Pendidikan para calon imam pribumi didirikan Seminari Menengah di Sikka, Maumere, pada tanggal 2 Februari 1926 oleh P. Fransiscus Cornelissen, SVD, atas Prakarsa Mgr. Vestraelen, SVD, dan kemudian dipindahkan ke Mataloko lalu diresmikan pada tanggal 15 September 1929 di Mataloko, Ngadha, Flores. Sementara itu, atas dasar keputusan pemimpin tertinggi SVD, P. Wilhem Gier, SVD, setelah mendapat izin dari Vatikan pada tanggal 5 Mei 1937, Seminari Tinggi St. Paulus Ledalero, Maumere, didirikan secara resmi 20 Mei 1937, meskipun eksistensi Seminari Tinggi ini sudah ada secara informal di Mataloko pada tahun 1934 (Sermada, 2019:484-485).

Sampai pada tahun 1942, misi gereja Katolik di Kepulauan Sunda Kecil berpusat di Pulau Flores dan Pulau Timor. Ini berdampak pada perkembangan

jumlah umat katolik di kedua pulau ini. Hampir seluruh penduduk Pulau Flores, terutama penduduk yang masih memeluk agama tradisional di pedalaman Flores, menganut agama katolik berkat pembukaan sekolah di mana-mana oleh para misionaris Serikat Sabda Allah. Begitu juga halnya di Pulau Timor. Sebahagian penduduk wilayah Timor (bukan Timor Timur) yang belum dikuasai oleh Protestan seperti Belu dan Timor Tengah Utara menjadi pemeluk agama katolik. Puncaknya tercapai pada pemekaran Vikariat Apostolik Kepulauan Sunda Kecil ke dalam dua bagian Vikariat Apostolik pada tahun 1936. Dua Vikariat Apostolik itu adalah Vikariat Apostolik Kepulauan Sunda Kecil untuk Wilayah Flores, termasuk Sumba, Mataram di Lombok dan Denpasar di Bali dan Vikariat Apostolik Timor untuk Pulau Timor dalam wilayah kekuasaan Hindia Belanda (bukan Timor Timur).

Pendudukan Jepang atas Indonesia 1942-1945 membawa situasi suram untuk kehidupan umat katolik di wilayah kepulauan Sunda Kecil, khususnya Pulau Flores. Pemerintahan Jepang lebih bersympati kepada agama Islam yang dipeluk oleh mayoritas penduduk Indonesia (80%) dari kekristenan yang berkisar pada 2,5% penduduk Indonesia (Steenbrink, 2018:3-5). Hampir seluruh misionaris Serikat Sabda Allah yang berkebangsaan Belanda di Flores dan Timor ditawan oleh tentara Jepang dan dibuang ke Pare-Pare, Sulawesi. Dalam pandangan pemerintah Jepang, gereja katolik dan para misionaris Belanda merupakan kaki tangan pemerintahan Hindia Belanda. Banyak stasi yang dilayani secara tetap oleh seorang misionaris Belanda ketiadaan pastor. Banyak gedung sekolah di beberapa tempat di Flores rusak oleh karena terkena bom tentara Jepang. Aset-aset misi seperti gedung-gedung, alat perlengkapan sekolah dan perlengkapan lain untuk kegiatan misi disita atau juga dicuri. Di Pulau Timor hampir semua bangunan gereja dihancurkan oleh tentara Jepang dan bahan-bahan bangunannya digunakan untuk kepentingan Jepang (Steenbrink, 2018:415). Pukulan yang merugikan persekolahan katolik di Flores adalah peraturan pemerintah Jepang pada 17 September 1942, bahwa pelajaran agama dan doa dilarang baik di dalam jam sekolah maupun di luar sekolah. Semua sekolah menjadi milik pemerintah dan berazaskan “netral” tanpa karakter agama. Bahasa Belanda dihapuskan dan ideologi Pendidikan Jepang harus dimasukkan dalam kurikulum, seperti lagu kebangsaan Jepang, Ilmu Bumi Jepang dan Sejarah Jepang, dll.

Keadaan kegiatan misi katolik, terutama persekolahan, pada pendudukan Jepang berubah ke arah yang lebih baik, ketika umat katolik di Flores mendapat “Empat Malaikat dari Gereja Katolik di Jepang (Jebarus, 2008: 120). Mereka adalah uskup Nagashaki, administrator Apostolis Hiroshima, dan dua imam praja (satu dari diosis Nagashaki dan satu dari Praefektur Apostolis Yokohama). Merekalah yang menjadi jembatan penghubung antara penguasa Jepang dan para pemuka agama di Flores, termasuk para misionaris Serikat Sabda Allah, dan dampak dari pengaruh kehadiran misionaris Jepang ini ialah bahwa sikap dan gambaran negatif para penguasa Jepang terhadap kegiatan misi gereja katolik di

Flores berubah sama sekali menjadi gambaran yang sangat positif. Sikap umat katolik yang ramah, bersahabat, dan kuat dalam iman mengesankan hati penguasa Jepang. Seorang Kolonel Jepang, Tasuko Sato, menulis dalam karyanya yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia “Aku Terkenang Flores” menulis dengan kata-kata sbb: *“Sebagian hatiku tinggal di Flores, di mana saya sebenarnya ingin tinggal. Saya berutang budi terhadap penduduknya untuk selama-lamanya karena mereka sudah memberiku iman dan cara hidup baru”* (Jebarus, 2008: 121).

Kehidupan misi katolik di Kepulauan Sunda Kecil sesudah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 hingga pengakuan resmi kemerdekaan Indonesia oleh Belanda pada tanggal 27 Desember 1949 dikembalikan sepenuhnya kepada urusan gereja katolik di bawah Vikariat Apostolik Kepulauan Sunda Kecil seperti sebelum penduduk Jepang. Tetapi di bidang politik, pada kurun waktu 1945-1950 Belanda membentuk pemerintahan yang tidak langsung di Flores dengan mendukung Sembilan penguasa lokal yang disebut “Sinar Sembilan”, yaitu daerah Manggarai; Ngada; Nage-Keo; Riung; Ende; Lio; Sikka; Larantuka; Adonara (Steenbrink, 2018:374-375). Tiga darinya dipimpin oleh tiga raja Muslim (Riung; Ende dan Adonara), dan 6 daerah dipimpin oleh enam raja Katolik, dan kesatuan kerajaan-kerajaan ini berada di bawah kepemimpinan raja Sikka, yaitu Thomas Ximenes da Silva. Kerajaan-kerajaan kecil itu adalah bentukan pemerintahan kolonial Belanda. Karena itu, tidak ada semangat nasionalisme yang menggebu-gebu di Indonesia Timur, termasuk di NTT pada kurun waktu sesudah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Semangat itu juga tidak mendapat sorotan di media cetak di Flores (Jebarus, 2017:123). Pembicaraan tentang politik di Seminari Tinggi Ledalero dilarang hingga tahun 1949 ketika Belanda secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia. Meskipun demikian, sejalan dengan semangat proklamasi kemerdekaan Indonesia, orang-orang katolik di Flores membentuk persatuan politik katolik Flores pada tahun 1948 dengan pemimpin A. Bulan Terang de Rosari dan kemudian bergabung dengan partai katolik nasional di bawah pimpinan Ignasius Kasimo. Sementara itu, umat katolik di Pulau Timor di bawah Prefektur Apostolik Atambua bertahan kuat dalam iman katolik, sebagaimana ditulis oleh Prefek Apostoliknya, Mgr. Jacob Pessers, SVD pada tahun 1945: *“Saya hampir tidak bisa percaya bahwa iman di paroki-paroki kita dalam banyak kasus telah mengakar begitu kuat dan mendalam”* (Steenbrink, 2018:415).

3. Kepustakaan

Alkhatab, Umar Ibnu, Drs., Msi, *Ikhtiar Menggali Identitas Lokal: Pengalaman Muslim*

Lamakera. Dalam Wacana Identitas Muslim Pribumi NTT. Philipus Tule; Fredrik Doeka;

Donatus Semarda, Mencermati Gereja Katolik di Kepulauan Sunda Kecil

- Ahmad Atang (Ed.). Maumere: Penerbit Ledalero, 2015.
- Arndt, Paul, SVD., *Demon dan Paji. Dua Bersaudara yang Bermusuhan di Kepulauan Solor*. Maumere: Penerbit Puslit Candraditya, 2002.
- Audi, Robert (Ed.), *The Cambridge Dictionary of Philosophy*. New York: Cambridge University Press, 1995.
- Bagian Dokumentasi-Penerangan Kantor Wali Gereja Indonesia, *Sejarah Gereja Katolik Indonesia 1 Umat Katolik Perintis 645 – 1500. Awal Mula abad ke-14 – abad ke-18*. Ende: Percetakan Arnoldus, 1974.
- Camnahas, Antonio, *The Catholic Mission in the Lesser Sunda Islands – Indonesia under the Society of the Divine Word (SVD). From One Apostolic Prefecture to Two Apostolic Vicariates (1913 – 1942)*. Analecta-99. Roma: Apud Collegium Verbi Divini, 2020.
- Guilday, Peter, *The Sacred Congregation de Propaganda Fide (1622-1922)*. In *The Catholic Historical Review*. Jan.1921. Vol. 6 No.4 (Jan. 1921). New York: Catholic University of America Press.
- Hadiwijono, Harun, Dr., *Sari Sejarah Filsafat Barat 1*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1980.
- Hadiwijono, Harun, Dr., *Sari Sejarah Filsafat Barat 2*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1980.
- Jebarus, Eduard, Pr., *Sejarah Keuskupan Larantuka*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2017.
- Jebarus, Eduard, Pr., *Sejarah Persekolahan di Flores*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2008.
- Kilcullen, John, *Teori Politik Abad Pertengahan*. Dalam *Handbook Teori Politik*. Gerald F.Gaus & Chandran Kukathas (Ed.). Bandung: Penerbit Nusa Media, 2012.
- Reksosusilo, S.Dr., C.M., *Filsafat Wawasan Nusantara*. Malang: Pusat Publikasi Filsafat Teologi Widya Sasana, 2007.
- Sermada, K. Donatus, SVD, *SDK dan SD INPRES Suatu Studi Sosio-Fenomenologi Pelaku Pendidikan di Kabupaten Flores Timur*. Malang: Penerbit Dioma, 2018.
- Sermada, Kelen Donatus, *Tradisi Semana Santa: Suatu Bentuk Katekese yang Hidup*. Dalam *Donatus Sermada, Mencermati Gereja Katolik di Kepulauan Sunda Kecil*

Pembaharuan Gereja Melalui Katekese. Robert Pius Manik, O.Carm; Adi

Saptowidodo, CM; Antonius Sad Budianto, CM (Ed.). Seri Filsafat Teologi Widya Sasana,

Vol. 28 No. Seri 27, 2018

Sermada, Donatus, *STFK Ledalero di Hadapan Kebijakan Pendidikan Tinggi Nasional Indonesia*

– *Suatu Tinjauan Sosio-Politis. Dalam Hidup Sebuah Pertanyaan Kenangan 50 Tahun*

STFK Ledalero. Matias Daven dan Georg Kirchberger (Ed.). Maumere: Penerbit

Ledalero, 2019.

Steenbrink, Karel, *Orang-Orang Katolik di Indonesia 1808 – 1942.* Jilid 1. Maumere: Penerbit

Ledalero, 2003.

Steenbrink, Karel, *Orang-Orang Katolik di Indonesia 1945 – 2010.* Jilid 3. Maumere: Penerbit

Ledalero, 2018.

Vriens, G., SJ., *Sejarah Gereja Katolik Indonesia 2. Wilayah Tunggal Prefektur-Vikariat Abad ke-*

19 Awal Abad ke-20. Ende: Percetakan Arnoldus, 1972.

Waardenburg, Jacques, *Religionen und Religion.* Berlin: Walter de Gruyter, 1986.

www.Congregation for the Evangelization of Peoples, Google, diakses 31 Oktober 2022.